

PENGEMBANGAN PLATFORM “POJOK LITERASI DEMOKRASI DIGITAL” SEBAGAI UPAYA PENGUATAN PARTISIPASI DAN PENGAWASAN DEMOKRASI BERBASIS TEKNOLOGI

Satya Irawatiningrum¹, Nibrosu Rohid², Nabrisi Rohid^{3*}, Andi Surya⁴, Aldianni Dinda Raudiah⁵, M. Arifin⁶, Erik Gustino⁷

¹Universitas PGRI Ronggolawe. Email: regzinata2012@gmail.com

²Universitas PGRI Ronggolawe, Email: nibrosurohid@unirow.ac.id

^{3*}Universitas PGRI Ronggolawe, Email: nabrisirohid@unirow.ac.id

⁴Universitas PGRI Ronggolawe, Email: andisurya@unirow.ac.id

⁵Universitas PGRI Ronggolawe, Email: aldiannidindaraudiah@unirow.ac.id

⁶Bawaslu Tuban, Email: m.arifin1986@gmail.com

⁷Bawaslu Tuban, Email: erikgustino3@gmail.com

ABSTRACT

Digital transformation has shifted democratic practices from conventional models toward technology-based participatory systems. While it provides broader opportunities for public engagement, key challenges remain, including low levels of democratic literacy, limited public participation, and the spread of misinformation in digital spaces. This study aims to develop the “Digital Democracy Literacy Corner” platform as a medium for education, participation, and public oversight. The research employs a participatory approach based on community service, consisting of planning, development, implementation, assistance, and evaluation stages. Data were collected through observation, pre-test and post-test questionnaires, and interviews involving 120 respondents from diverse backgrounds. The results indicate improvements in democratic literacy by 42%, public participation by 37%, and reporting of democratic issues by 28%. Additionally, the platform reduced misinformation by 31% and increased system efficiency by 45%. These findings demonstrate that integrating education, participation, and verification within a single digital platform is effective in strengthening participatory democracy and has strong potential for replication to support inclusive and sustainable democratic governance.

Keywords: Digital Democracy, Democratic Literacy, Public Participation, Digital Platform

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah praktik demokrasi dari model konvensional menuju model partisipatif berbasis teknologi. Meskipun membuka peluang keterlibatan publik yang lebih luas, tantangan utama masih berupa rendahnya literasi demokrasi, minimnya partisipasi masyarakat, serta tingginya disinformasi di ruang digital. Pengabdian ini bertujuan mengembangkan platform “PojoK Literasi Demokrasi Digital” sebagai media edukasi, partisipasi, dan pengawasan masyarakat. Metode pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pengabdian masyarakat melalui tahapan perencanaan, pengembangan, implementasi, pendampingan, dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner pre-test dan post-test, serta wawancara terhadap 120 responden dari berbagai latar belakang. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan literasi demokrasi sebesar 42%, partisipasi masyarakat sebesar 37%, dan pelaporan isu demokrasi sebesar 28%. Selain itu, platform mampu menekan disinformasi sebesar 31% dan meningkatkan efisiensi sistem sebesar 45%. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi edukasi, partisipasi, dan verifikasi dalam satu platform digital efektif dalam memperkuat demokrasi partisipatif berbasis teknologi serta berpotensi direplikasi untuk mendukung tata kelola demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Demokrasi Digital, Literasi Demokrasi, Partisipasi Masyarakat, Platform Digital

PENDAHULUAN

Demokrasi digital berkembang sebagai respons terhadap disrupsi teknologi yang mengubah pola komunikasi politik dan distribusi kekuasaan (Boulianne, 2020). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, berdiskusi, serta mengawasi penyelenggaraan demokrasi melalui ruang digital (Congge et al. 2023). Transformasi tersebut sejalan dengan konsep ruang publik Jürgen Habermas yang menempatkan diskusi dan pertukaran gagasan sebagai fondasi partisipasi demokratis. Ruang virtual memperluas kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam proses komunikasi publik tanpa terbatas oleh jarak geografis (Fadilla & Rahmawati 2025).

Di Indonesia, penetrasi internet yang mencapai lebih dari 221 juta pengguna menunjukkan besarnya potensi pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat partisipasi demokrasi (Fathullah et al. 2025). Peningkatan akses internet belum menjamin kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Partisipasi digital masih berpotensi terbatas pada konsumsi informasi, interaksi simbolik, dan penyampaian pendapat tanpa keterlibatan berkelanjutan dalam diskusi publik maupun pengawasan demokrasi (Priyono, 2026). Tingginya penetrasi internet tetap menjadi peluang strategis untuk mengembangkan partisipasi politik berbasis digital (Wiyono et al. 2025). Penelitian Dinda (2026) menjelaskan pemanfaatan program One Day One Post oleh Bawaslu Kabupaten Tuban untuk mendistribusikan informasi kepemiluan secara konsisten melalui media sosial. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk menekankan pentingnya pembaruan materi edukasi secara berkala agar platform pengabdian tetap relevan dan digunakan masyarakat (Raudiah et al. 2026).

Permasalahan utama mitra dalam kegiatan pengabdian ini diarahkan pada keterbatasan literasi demokrasi digital, rendahnya kapasitas evaluasi informasi, belum optimalnya partisipasi konstruktif, serta kerentanan terhadap disinformasi. Literasi demokrasi mencakup pemahaman prinsip demokrasi, kemampuan menganalisis informasi, dan kesadaran politik sebagai warga negara. Literasi digital melengkapi kemampuan tersebut melalui keterampilan mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis (Fadilla & Rahmawati 2025). Rendahnya kedua bentuk literasi tersebut dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap hoaks, disinformasi, dan propaganda politik yang mengancam kualitas demokrasi (Wahidin et al. 2025).

Penyebaran disinformasi menjadi persoalan penting dalam ekosistem demokrasi digital. Kemudahan produksi dan distribusi informasi tidak selalu diimbangi kemampuan masyarakat untuk memeriksa sumber, menguji akurasi, dan membedakan informasi faktual dari informasi manipulatif. Kondisi tersebut dapat memicu polarisasi opini publik, kesalahpahaman, dan fragmentasi sosial (Guess & Lyons, 2020). Rendahnya keterlibatan warga dalam diskusi daring, penyampaian aspirasi, dan pelaporan isu juga membatasi fungsi ruang digital sebagai sarana pengawasan demokrasi. Partisipasi digital yang pasif atau simbolik belum sepenuhnya mendukung penguatan demokrasi partisipatif (Boulianne, 2020).

Analisis kebutuhan kegiatan berangkat dari kesenjangan antara ketersediaan akses digital dan kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi untuk kegiatan

demokratis yang kritis, bertanggung jawab, dan konstruktif. Kebutuhan utama yang perlu dijawab meliputi peningkatan pemahaman prinsip demokrasi, penguatan keterampilan verifikasi informasi, penyediaan ruang diskusi dan penyampaian aspirasi, serta pembentukan mekanisme partisipasi yang mudah diakses. Perspektif *socio-technical system theory* menegaskan pentingnya keselarasan antara teknologi, kapasitas manusia, dan konteks sosial dalam mendukung keberhasilan pemanfaatan sistem digital. Keterbatasan literasi digital turut meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap manipulasi informasi (Nguyen & Lee, 2026).

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian ini menawarkan pengembangan dan pemanfaatan platform “Pojok Literasi Demokrasi Digital” sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan verifikasi informasi. Komponen edukasi menyediakan materi mengenai prinsip demokrasi, hak dan tanggung jawab warga negara, serta evaluasi informasi digital. Komponen partisipasi memfasilitasi diskusi, penyampaian aspirasi, dan pelaporan isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Komponen verifikasi menyediakan panduan pemeriksaan sumber, penelusuran fakta, dan identifikasi informasi yang berpotensi menyesatkan. Integrasi ketiga komponen tersebut diharapkan dapat menjembatani kebutuhan peningkatan literasi dengan praktik partisipasi demokratis yang lebih bertanggung jawab.

Secara konseptual, literasi demokrasi menjadi aspek utama yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian, sedangkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu hasil yang diharapkan. Literasi demokrasi mencakup pemahaman demokrasi, kemampuan analisis informasi, dan kesadaran politik. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam diskusi digital, penyampaian aspirasi, serta pelaporan isu. Platform digital berfungsi sebagai sarana pendukung yang menghubungkan proses pembelajaran dengan penerapan pengetahuan dalam aktivitas partisipatif. Penggunaan platform juga diarahkan untuk memperkuat kebiasaan verifikasi informasi sebelum masyarakat menerima atau menyebarkan konten digital.

Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada pengintegrasian edukasi demokrasi, partisipasi publik, dan verifikasi informasi dalam satu platform yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pendekatan *community-based participatory research* (CBPR) digunakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi hasil. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif, bukan sekadar penerima materi edukasi. Orientasi kegiatan diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menggunakan ruang digital secara kritis, inklusif, dan bertanggung jawab.

Tujuan kegiatan pengabdian adalah meningkatkan literasi demokrasi digital masyarakat, memperkuat kemampuan mengevaluasi dan memverifikasi informasi, mendorong partisipasi konstruktif dalam ruang digital, serta mengembangkan platform edukasi dan partisipasi yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Kegiatan ini juga bertujuan membangun kesadaran mengenai risiko disinformasi dan mendorong penerapan perilaku berbagi informasi secara bertanggung jawab. Keberhasilan program diarahkan untuk dinilai melalui perubahan pemahaman peserta, keterampilan verifikasi informasi,

keterlibatan dalam aktivitas partisipatif, serta pemanfaatan platform selama pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan tujuan tersebut, proposisi keberhasilan kegiatan pengabdian dirumuskan bahwa Pelaksanaan edukasi melalui platform *Pojok Literasi Demokrasi Digital* diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan praktik demokrasi digital. Selain itu, Pelatihan evaluasi dan verifikasi informasi diharapkan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali serta menyikapi disinformasi. Penyediaan ruang diskusi, penyampaian aspirasi, dan pelaporan isu diharapkan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan konstruktif. Integrasi komponen edukasi, partisipasi, dan verifikasi diharapkan mendukung penerapan literasi demokrasi dalam aktivitas digital masyarakat. Penerapan platform diharapkan mendorong perilaku penggunaan dan penyebaran informasi yang lebih kritis, selektif, dan bertanggung jawab.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan menghasilkan model pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi yang mengintegrasikan peningkatan literasi demokrasi, perluasan partisipasi publik, dan penguatan verifikasi informasi. Model tersebut diarahkan untuk mendukung terbentuknya ekosistem demokrasi digital yang lebih inklusif, partisipatif, dan kredibel. Potensi replikasi program dapat dikembangkan sesuai karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas masyarakat pada lokasi pengabdian lainnya.

METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *community-based participatory research* (CBPR), yaitu pendekatan pengabdian partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh proses pengabdian. Secara konseptual, CBPR berakar pada paradigma konstruktivisme dan teori pemberdayaan (*empowerment theory*), yang menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya dihasilkan oleh peneliti, tetapi dikonstruksi secara kolektif melalui interaksi antara peneliti dan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek pengabdian, melainkan sebagai mitra yang memiliki pengalaman, pengetahuan lokal, dan kapasitas untuk berkontribusi dalam proses pengabdian.

Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan tujuan pengabdian yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial yang nyata, khususnya dalam meningkatkan literasi dan partisipasi demokrasi masyarakat. Selain itu, CBPR juga relevan dengan kerangka teori demokrasi partisipatif, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan publik. Dengan demikian, penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berkelanjutan.

Implementasi peneliti berperan sebagai fasilitator yang menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan pengembangan sistem teknologi. Kolaborasi dilakukan secara intensif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui proses dialog, refleksi, dan evaluasi bersama. Pendekatan ini juga memungkinkan terjadinya *co-creation*, di mana platform yang dikembangkan merupakan hasil dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar asumsi peneliti.

Pengabdian ini menggunakan desain *mixed methods* dengan model *sequential explanatory*, yaitu penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Pendekatan ini didasarkan pada paradigma pragmatisme yang memandang bahwa penggunaan metode campuran dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena pengabdian.

Pada tahap pertama, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur perubahan tingkat literasi demokrasi dan partisipasi masyarakat melalui instrumen *pre-test* dan *post-test*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat objektif dan terukur, serta untuk menguji efektivitas intervensi yang dilakukan melalui platform digital.

Pada tahap kedua, pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam dan menjelaskan hasil kuantitatif yang diperoleh. Melalui wawancara mendalam dan observasi, peneliti dapat menggali pengalaman, persepsi, serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara statistik. Dengan demikian, desain ini tidak hanya menghasilkan data numerik, tetapi juga memberikan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam mengenai perubahan perilaku masyarakat.

Subjek pengabdian terdiri dari dua kelompok utama, yaitu masyarakat sebagai pengguna platform dan pemangku kepentingan sebagai aktor strategis dalam sistem demokrasi. Kelompok masyarakat berjumlah 120 responden yang berperan sebagai pengguna aktif platform “Pojok Literasi Demokrasi Digital”. Sementara itu, kelompok stakeholder terdiri dari 15 informan yang meliputi perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), akademisi, serta praktisi di bidang komunikasi dan demokrasi.

Pemilihan subjek pengabdian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan pengabdian. Kriteria tersebut meliputi: (1) memiliki akses terhadap perangkat digital, (2) memiliki pengalaman dalam menggunakan media sosial, dan (3) bersedia mengikuti seluruh tahapan pengabdian. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa responden memiliki kapasitas dasar dalam memanfaatkan teknologi digital, sehingga hasil pengabdian dapat lebih akurat dalam mengukur efektivitas platform.

Pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Tuban, yang dipilih berdasarkan pertimbangan strategis. Secara empiris, wilayah ini memiliki tingkat penetrasi internet yang cukup tinggi, sehingga mendukung implementasi platform digital. Selain itu, dinamika demokrasi lokal yang aktif serta ketersediaan mitra kelembagaan seperti Bawaslu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengabdian.

Instrumen pengabdian dalam studi ini dirancang secara komprehensif untuk mampu menangkap data kuantitatif dan kualitatif secara seimbang, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner literasi demokrasi yang disusun menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 5. Pemilihan skala ini bertujuan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan secara lebih terukur dan sistematis.

Kuesioner tersebut terdiri dari 20 item pernyataan yang dikembangkan berdasarkan tiga dimensi utama literasi demokrasi, yaitu pemahaman demokrasi, kemampuan analisis informasi, dan kesadaran politik. Dimensi pemahaman demokrasi mengukur sejauh mana responden memahami konsep, prinsip, dan mekanisme demokrasi. Dimensi kemampuan analisis informasi berfokus pada kemampuan responden dalam menyaring, mengevaluasi, serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh, khususnya di ruang digital. Sementara itu, dimensi kesadaran politik mengukur tingkat kepedulian dan keterlibatan responden terhadap isu-isu politik dan proses demokrasi. Selain instrumen kuantitatif, pengabdian ini juga menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali data kualitatif secara lebih mendalam. Wawancara ini berfokus pada pengalaman pengguna dalam memanfaatkan platform, persepsi terhadap kemudahan dan manfaat sistem, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses partisipasi. Pendekatan semi-terstruktur dipilih agar peneliti tetap memiliki kerangka pertanyaan yang sistematis, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi responden untuk menyampaikan pengalaman secara lebih luas.

Guna melengkapi data, digunakan pula instrumen observasi yang bertujuan untuk mengamati perilaku pengguna secara langsung dalam menggunakan platform. Observasi ini mencakup beberapa indikator, seperti frekuensi penggunaan, pola interaksi antar pengguna, serta bentuk partisipasi yang dilakukan, baik dalam diskusi, penyampaian aspirasi, maupun pelaporan isu.

Sebelum digunakan dalam proses pengabdian, seluruh instrumen telah melalui tahap pengujian untuk memastikan kualitas dan keandalannya. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara tepat. Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai ambang di atas 0,70, yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel, sehingga layak digunakan dalam pengumpulan data pengabdian.

Pengumpulan data dalam pengabdian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang dirancang secara komplementer, dengan tujuan memperoleh data yang komprehensif dan mampu merepresentasikan fenomena secara utuh. Teknik pertama yang digunakan adalah observasi, yang dilakukan secara langsung terhadap perilaku pengguna dalam berinteraksi dengan platform "Pojok Literasi Demokrasi Digital". Melalui observasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola penggunaan, intensitas interaksi, serta bentuk partisipasi yang muncul secara natural tanpa intervensi langsung. Pendekatan ini penting untuk menangkap dinamika perilaku aktual yang seringkali tidak sepenuhnya dapat diungkap melalui instrumen kuesioner.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk *pre-test* dan *post-test*. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur perubahan tingkat literasi demokrasi dan partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah intervensi platform. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi secara kuantitatif sejauh mana efektivitas platform dalam meningkatkan kapasitas responden. Perbandingan antara

hasil pre-test dan post-test menjadi dasar dalam mengukur tingkat peningkatan yang terjadi.

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data kualitatif yang lebih detail dan kontekstual. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif responden, persepsi terhadap penggunaan platform, serta hambatan yang dihadapi dalam proses partisipasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami aspek-aspek yang tidak terjangkau oleh data kuantitatif, seperti motivasi, persepsi, dan dinamika sosial yang memengaruhi perilaku responden.

Teknik terakhir yang digunakan adalah dokumentasi, yang meliputi pengumpulan data aktivitas pengguna dalam platform, rekam jejak interaksi, serta laporan sistem yang dihasilkan selama pengabdian berlangsung. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai sumber data pendukung yang dapat memperkuat temuan dari observasi, kuesioner, dan wawancara.

Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk menerapkan pendekatan triangulasi, yaitu membandingkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil pengabdian. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga memiliki kedalaman konteks yang memadai.

Analisis data dalam pengabdian ini dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara integratif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data numerik yang diperoleh dari kuesioner pre-test dan post-test. Tahap awal analisis dilakukan melalui statistik deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan distribusi data, seperti nilai rata-rata, persentase, dan kecenderungan umum responden.

Analisis komparatif pada pengabdian ini menggunakan *paired sample t-test* untuk menguji signifikansi perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah intervensi. Uji ini digunakan untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi bukan bersifat kebetulan, melainkan merupakan dampak dari penggunaan platform. Selain itu, dilakukan pula perhitungan *gain score* untuk mengukur tingkat peningkatan yang terjadi pada masing-masing indikator, sehingga dapat diketahui efektivitas intervensi secara lebih spesifik.

Analisis kualitatif juga dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini diawali dengan reduksi data, yaitu penyederhanaan dan pemilihan data yang relevan. Selanjutnya dilakukan kategorisasi untuk mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti pengalaman pengguna, persepsi terhadap platform, dan hambatan partisipasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data.

Guna meningkatkan keabsahan hasil pengabdian, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber, yaitu data kuantitatif, hasil wawancara, dan observasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta meminimalisasi bias dalam interpretasi data.

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip siklus partisipatif dalam pendekatan CBPR. Tahap pertama adalah perencanaan, yang meliputi identifikasi masalah, analisis

kebutuhan masyarakat, serta penyusunan desain program. Pada tahap ini, peneliti melakukan eksplorasi awal untuk memahami kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat terkait literasi dan partisipasi demokrasi.

Tahap kedua adalah pengembangan platform, yang mencakup perancangan sistem berbasis *user interface* dan *user experience* (UI/UX) untuk memastikan kemudahan penggunaan. Selain itu, dilakukan pengembangan fitur utama, seperti modul literasi, forum diskusi, sistem pelaporan, dan mekanisme verifikasi. Tahap ini juga melibatkan uji coba awal (*pilot testing*) untuk mengidentifikasi potensi kendala teknis.

Tahap ketiga adalah implementasi, yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa pengguna memahami cara menggunakan platform secara optimal.

Tahap pendampingan dilakukan dengan memberikan monitoring penggunaan platform, bantuan teknis, serta evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi pengguna. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan penggunaan platform serta meningkatkan efektivitasnya.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang dilakukan dengan mengukur efektivitas platform melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan serta pengembangan sistem ke depan.

Pengabdian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika pengabdian yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan responden. Salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah *informed consent*, yaitu pemberian informasi yang jelas kepada responden mengenai tujuan, prosedur, serta manfaat pengabdian sebelum mereka menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi.

Peneliti juga menjamin kerahasiaan data responden dengan tidak mencantumkan identitas pribadi dalam laporan pengabdian. Seluruh data yang diperoleh disimpan dan digunakan hanya untuk kepentingan akademik, serta tidak disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin.

Responden juga diberikan hak untuk mengundurkan diri dari pengabdian kapan saja tanpa konsekuensi apapun. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip etika dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi digital merupakan transformasi sistem demokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memengaruhi distribusi informasi, komunikasi politik, dan partisipasi public (Congge et al. 2023). Teknologi digital juga memperluas hubungan antara negara dan masyarakat melalui komunikasi serta partisipasi berbasis internet (Blumler & Coleman 2021). Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen dan distributor informasi (*prosumer*) yang berperan dalam pembentukan opini publik.

Demokrasi digital mencakup dua dimensi utama, yaitu akses informasi dan partisipasi Masyarakat (Ali et al. 2024). Keduanya saling melengkapi dalam mendukung kualitas demokrasi melalui keterlibatan warga dalam diskusi, penyampaian aspirasi, dan

pengawasan public (Van Dijk, 2020). Kerangka ini mendasari pengembangan platform “Pojok Literasi Demokrasi Digital” sebagai sarana edukasi dan partisipasi masyarakat.

Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman demokrasi dari 48% menjadi 90%, kemampuan analisis informasi dari 39% menjadi 78%, dan kesadaran politik dari 52% menjadi 88%. Partisipasi diskusi digital meningkat dari 41% menjadi 78%, penyampaian aspirasi dari 36% menjadi 73%, dan pelaporan isu dari 29% menjadi 57%. Perubahan tersebut menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator yang diukur setelah kegiatan, meskipun belum cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat tanpa pengujian tambahan.

Peningkatan literasi dan partisipasi menunjukkan relevansi platform dalam mendukung edukasi demokrasi digital. Capaian pelaporan isu yang relatif lebih rendah menjadi dasar perlunya pendampingan lanjutan, khususnya dalam verifikasi informasi dan prosedur pelaporan. Evaluasi respons peserta, tanggapan mitra, serta keberlanjutan penggunaan platform diperlukan untuk menilai manfaat program secara lebih menyeluruh..

Peningkatan Literasi Demokrasi Masyarakat

Pelaksanaan pengabdian melalui platform *Pojok Literasi Demokrasi Digital* menunjukkan perubahan positif pada tiga indikator literasi demokrasi, yaitu pemahaman demokrasi, kemampuan analisis informasi, dan kesadaran politik. Literasi demokrasi merupakan kemampuan individu memahami prinsip, mekanisme, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Kemampuan tersebut menjadi landasan keterlibatan warga dalam proses politik dan pengambilan keputusan public (Singh and Ramaiah 2021). Perkembangan ruang digital turut menuntut penguasaan literasi digital, terutama kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memproduksi informasi secara kritis (Fadilla & Rahmawati, 2025; Nguyen & Lee, 2026).

Tabel 1. Perubahan Indikator Literasi Demokrasi

Indikator	Pre-Test (%)	Post-test(%)	Peningkatan (%)
Pemahaman Demokrasi	48	90	+42
Analisis Informasi	39	78	+39
Kesadaran Politik	52	88	+36
Rata-rata	46,33	85,33	+39

Sumber : Data Hasil Pengabdian

Indikator pemahaman demokrasi mengalami peningkatan terbesar, dari 48% menjadi 90%, dengan perubahan sebesar 42 poin persentase. Capaian tersebut menunjukkan bahwa skor pemahaman demokrasi setelah kegiatan lebih tinggi dibandingkan sebelum kegiatan. Hasil ini relevan dengan tujuan program untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai prinsip demokrasi dan peran warga negara. Materi edukasi melalui platform berpotensi membantu peserta memahami konsep demokrasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penetapan efektivitas materi secara khusus tetap memerlukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan respons peserta.

Kemampuan analisis informasi meningkat dari 39% menjadi 78%, atau sebesar 39 poin persentase. Peningkatan tersebut menunjukkan perubahan positif pada indikator yang berkaitan dengan kemampuan peserta mengolah informasi. Dalam lingkungan digital, keterampilan ini penting karena masyarakat menghadapi arus informasi yang cepat, beragam, dan tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan. Literasi digital memerlukan kemampuan teknis sekaligus keterampilan kognitif dan kritis untuk menilai informasi (Fadilla & Rahmawati, 2025; Nguyen & Lee, 2026). Oleh karena itu, indikator analisis informasi menjadi salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi program literasi demokrasi digital.

Kesadaran politik meningkat dari 52% menjadi 88%, dengan perubahan sebesar 36 poin persentase. Capaian ini menunjukkan peningkatan pada indikator kesadaran politik yang diukur. Dalam konteks pengabdian, kesadaran politik diperlukan untuk mendukung keterlibatan masyarakat dalam diskusi, penyampaian aspirasi, dan pengawasan terhadap persoalan publik. Kualitas demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh akses teknologi, tetapi juga oleh kapasitas warga untuk menggunakan akses tersebut dalam kegiatan yang bermakna (Boulianne, 2020).

Secara keseluruhan, rata-rata ketiga indikator meningkat dari 46,33% menjadi 85,33%, dengan selisih 39 poin persentase. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator literasi demokrasi mengalami peningkatan setelah pelaksanaan kegiatan. Namun, selisih skor agregat belum cukup untuk membuktikan signifikansi statistik atau hubungan sebab-akibat. Interpretasi tersebut memerlukan informasi jumlah peserta, karakteristik instrumen, data individual, dan hasil pengujian statistik yang sesuai.

Dari perspektif kebutuhan mitra, capaian literasi ini menjadi dasar untuk mengevaluasi relevansi pendekatan edukasi yang digunakan. Peningkatan skor perlu dilengkapi penilaian terhadap kemampuan peserta menerapkan pengetahuan, misalnya melalui latihan mengidentifikasi sumber informasi, membandingkan pemberitaan, dan mengenali konten menyesatkan. Evaluasi berbasis praktik dapat menunjukkan apakah perubahan pengetahuan diikuti kemampuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan digital sehari-hari.

Perubahan Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Digital

Indikator pemahaman demokrasi mengalami peningkatan terbesar, dari 48% menjadi 90%, dengan perubahan sebesar 42 poin persentase. Capaian tersebut menunjukkan bahwa skor pemahaman demokrasi setelah kegiatan lebih tinggi dibandingkan sebelum kegiatan. Hasil ini relevan dengan tujuan program untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai prinsip demokrasi dan peran warga negara. Materi edukasi melalui platform berpotensi membantu peserta memahami konsep demokrasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penetapan efektivitas materi secara khusus tetap memerlukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan respons peserta.

Kemampuan analisis informasi meningkat dari 39% menjadi 78%, atau sebesar 39 poin persentase. Peningkatan tersebut menunjukkan perubahan positif pada indikator

yang berkaitan dengan kemampuan peserta mengolah informasi. Dalam lingkungan digital, keterampilan ini penting karena masyarakat menghadapi arus informasi yang cepat, beragam, dan tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan. Literasi digital memerlukan kemampuan teknis sekaligus keterampilan kognitif dan kritis untuk menilai informasi (Fadilla & Rahmawati, 2025; Nguyen & Lee, 2026). Oleh karena itu, indikator analisis informasi menjadi salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi program literasi demokrasi digital.

Kesadaran politik meningkat dari 52% menjadi 88%, dengan perubahan sebesar 36 poin persentase. Capaian ini menunjukkan peningkatan pada indikator kesadaran politik yang diukur. Dalam konteks pengabdian, kesadaran politik diperlukan untuk mendukung keterlibatan masyarakat dalam diskusi, penyampaian aspirasi, dan pengawasan terhadap persoalan publik. Kualitas demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh akses teknologi, tetapi juga oleh kapasitas warga untuk menggunakan akses tersebut dalam kegiatan yang bermakna (Boulianne, 2020).

Secara keseluruhan, rata-rata ketiga indikator meningkat dari 46,33% menjadi 85,33%, dengan selisih 39 poin persentase. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator literasi demokrasi mengalami peningkatan setelah pelaksanaan kegiatan. Namun, selisih skor agregat belum cukup untuk membuktikan signifikansi statistik atau hubungan sebab-akibat. Interpretasi tersebut memerlukan informasi jumlah peserta, karakteristik instrumen, data individual, dan hasil pengujian statistik yang sesuai.

Perspektif kebutuhan mitra, capaian literasi ini menjadi dasar untuk mengevaluasi relevansi pendekatan edukasi yang digunakan. Peningkatan skor perlu dilengkapi penilaian terhadap kemampuan peserta menerapkan pengetahuan, misalnya melalui latihan mengidentifikasi sumber informasi, membandingkan pemberitaan, dan mengenali konten menyesatkan. Evaluasi berbasis praktik dapat menunjukkan apakah perubahan pengetahuan diikuti kemampuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan digital sehari-hari.

Perubahan Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Digital

Demokrasi digital menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi melalui diskusi daring, penyampaian aspirasi, dan pelaporan persoalan publik. Partisipasi digital mencakup beragam bentuk keterlibatan warga dalam proses politik dan komunikasi public (Theocharis & Van Deth, 2017). Perluasan bentuk partisipasi melalui teknologi juga memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengawasan isu publik tanpa bergantung sepenuhnya pada forum konvensional (Saad & Margono, 2021).

Tabel 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Jenis Partisipasi	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Peningkatan (%)
Diskusi Digital	41%	78%	+37%
Penyampaian Aspirasi	36%	73%	+37%
Pelaporan Isu	29%	57%	+28%

Sumber: Data hasil pengabdian

Diskusi digital meningkat dari 41% menjadi 78%, sedangkan penyampaian aspirasi meningkat dari 36% menjadi 73%. Kedua indikator mengalami perubahan sebesar 37 poin persentase. Hasil tersebut memperlihatkan peningkatan pada dua bentuk partisipasi yang berkaitan dengan komunikasi dan penyampaian pendapat. Capaian ini relevan dengan kebutuhan menyediakan ruang digital yang memungkinkan masyarakat tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga berinteraksi dan menyampaikan pandangan.

Temuan tersebut penting mengingat partisipasi digital dapat berhenti pada aktivitas sederhana yang tidak menghasilkan keterlibatan substantif. Aktivitas berupa reaksi atau interaksi singkat tidak selalu mencerminkan partisipasi yang bermakna (Boulianne, 2020). Sebagian partisipasi digital juga masih cenderung pasif atau simbolik, sehingga diperlukan ruang yang dapat memfasilitasi diskusi dan keterlibatan lebih lanjut (Priyono, 2026). Maka dari itu, Peningkatan indikator diskusi dan penyampaian aspirasi menjadi capaian positif, tetapi kualitas argumentasi, keberagaman pendapat, dan tindak lanjut aspirasi tetap perlu dievaluasi.

Pelaporan isu meningkat dari 29% menjadi 57%, atau sebesar 28 poin persentase. Walaupun mengalami peningkatan, indikator tersebut masih lebih rendah daripada diskusi digital dan penyampaian aspirasi setelah kegiatan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelaporan isu perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan program. Pelaporan membutuhkan lebih dari sekadar keberanian menyampaikan pendapat; masyarakat juga perlu memahami prosedur, saluran pelaporan yang tepat, bukti pendukung, dan kemungkinan tindak lanjut.

Faktor seperti kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan, kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial, dan ketidakjelasan prosedur dapat menjadi kemungkinan hambatan. Namun, faktor-faktor tersebut belum dapat dinyatakan sebagai temuan aktual tanpa dukungan wawancara, observasi, atau hasil evaluasi peserta. Analisis lanjutan perlu menggali alasan di balik rendahnya indikator pelaporan melalui diskusi kelompok atau wawancara dengan peserta dan mitra.

Hasil tersebut memberikan arah perbaikan program berupa pelatihan pelaporan isu, simulasi penyampaian aspirasi, dan penjelasan mengenai saluran pengaduan yang relevan. Pendampingan dapat difokuskan pada proses penyusunan laporan, pemilihan informasi pendukung, dan pemahaman mekanisme tindak lanjut. Langkah ini diharapkan memperkuat keterhubungan antara peningkatan literasi dan penerapan partisipasi dalam praktik demokrasi digital.

Efektivitas Platform dan Penanganan Disinformasi

Platform *Pojok Literasi Demokrasi Digital* dirancang dengan mengintegrasikan edukasi, partisipasi, dan verifikasi informasi. Integrasi tersebut menempatkan teknologi sebagai sarana pendukung komunikasi publik, pembelajaran, dan keterlibatan masyarakat. Teknologi digital dapat memperluas akses terhadap informasi serta menyediakan peluang partisipasi yang lebih fleksibel (Nayyar et al. 2024; Yaseen et al. 2025). Efektivitas pemanfaatan teknologi dalam demokrasi tetap bergantung pada desain sistem dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna (Blumler & Coleman, 2021).

Tabel 3. Efektivitas Platform Digital

Indikator	Peningkatan (%)
Akses Informasi	Meningkat +62%
Efisiensi Waktu	Meningkat +45%
Penurunan Disinformasi	31%

Sumber: Data hasil pengabdian

Peningkatan akses informasi sebesar 62% menunjukkan capaian positif pada indikator akses yang dilaporkan dalam naskah. Hasil tersebut relevan dengan dimensi akses dalam demokrasi digital, yang menekankan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memahami persoalan publik. Akses informasi dan partisipasi aktif merupakan dua dimensi yang saling berkaitan dalam menentukan kualitas demokrasi digital (Ali et al. 2024; Van Dijk, 2020). Meskipun demikian, peningkatan akses tidak secara otomatis membuktikan peningkatan akurasi informasi atau kualitas pemahaman peserta.

Efisiensi waktu dilaporkan meningkat sebesar 45%. Indikator tersebut berpotensi menggambarkan kemudahan dalam mengakses materi atau menjalankan aktivitas yang difasilitasi platform. Penilaian yang lebih kuat memerlukan penjelasan mengenai metode pengukuran, seperti perbandingan durasi pengerjaan tugas sebelum dan sesudah penggunaan platform atau hasil evaluasi pengalaman pengguna. Tanpa informasi tersebut, angka 45% perlu diperlakukan sebagai hasil yang dilaporkan, bukan bukti final bahwa platform telah mengurangi waktu penggunaan secara terukur.

Penurunan disinformasi sebesar 31% merupakan indikator yang memerlukan perhatian khusus. Hasil tersebut dapat menunjukkan perubahan positif apabila pengukuran dilakukan menggunakan definisi, instrumen, dan periode yang konsisten. Namun, naskah perlu menjelaskan apakah angka tersebut berasal dari jumlah konten keliru yang teridentifikasi, tingkat kepercayaan peserta terhadap informasi keliru, atau kemampuan peserta mengenali disinformasi. Ketiga indikator tersebut mengukur aspek yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan.

Disinformasi menjadi tantangan dalam demokrasi digital karena kemudahan penyebaran informasi tidak selalu diikuti kemampuan memeriksa kebenarannya. Ekosistem digital dapat memperbesar risiko manipulasi informasi dan polarisasi opini publik (Guess & Lyons, 2020). Oleh sebab itu, platform perlu menyediakan panduan verifikasi yang mudah diterapkan, latihan membandingkan sumber, dan edukasi mengenai karakteristik informasi menyesatkan. Penggunaan mekanisme verifikasi harus diposisikan sebagai upaya mitigasi risiko, bukan jaminan bahwa seluruh disinformasi dapat dihilangkan.

Dari sisi pengembangan program, hasil tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terpisah terhadap setiap komponen platform. Komponen edukasi dapat dinilai melalui perubahan pengetahuan, komponen partisipasi melalui aktivitas pengguna, dan komponen verifikasi melalui kemampuan peserta memeriksa informasi. Pemisahan indikator akan membantu tim pengabdian dan mitra mengidentifikasi bagian yang telah menunjukkan capaian serta bagian yang membutuhkan penyempurnaan

Respon Peserta dan Mitra serta Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Keberhasilan pengabdian masyarakat perlu dinilai melalui perubahan indikator hasil dan pengalaman pihak yang terlibat dalam kegiatan. Respons peserta dapat memberikan gambaran tentang relevansi materi, kemudahan penggunaan platform, manfaat yang dirasakan, dan hambatan selama pelaksanaan. Respons mitra diperlukan untuk menilai kesesuaian solusi dengan permasalahan yang dihadapi, kesiapan melanjutkan program, dan dukungan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan.

Data kuantitatif yang tersedia menunjukkan peningkatan pada indikator literasi demokrasi dan partisipasi masyarakat. Namun, peningkatan tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengganti data kepuasan atau respons peserta. Naskah yang tersedia belum menyertakan hasil kuesioner kepuasan, kutipan wawancara, catatan observasi, atau pernyataan langsung dari mitra. Oleh karena itu, penilaian tentang penerimaan program oleh peserta dan mitra masih memerlukan bukti lapangan tambahan.

Evaluasi respons peserta sebaiknya mencakup persepsi terhadap kejelasan materi, relevansi contoh yang digunakan, kemudahan mengakses fitur, dan manfaat latihan verifikasi informasi. Pertanyaan evaluasi juga dapat diarahkan pada kendala yang dihadapi peserta, fitur yang paling membantu, dan aspek yang perlu diperbaiki. Hasil tersebut dapat dianalisis secara deskriptif untuk data kuesioner atau secara tematik untuk data wawancara.

Respons mitra perlu dianalisis berdasarkan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, kemudahan implementasi, ketersediaan sumber daya, dan peluang penerapan setelah kegiatan selesai. Penilaian mitra juga dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan pendampingan lanjutan, khususnya dalam pengelolaan diskusi dan penguatan mekanisme pelaporan isu. Pendekatan community-based participatory research (CBPR) relevan untuk menjaga keterlibatan masyarakat dan mitra dalam identifikasi kebutuhan, pelaksanaan, serta evaluasi program.

Bagian ini perlu dilengkapi menggunakan data autentik dari pelaksanaan kegiatan. Apabila tersedia, kutipan peserta dapat disajikan untuk menggambarkan pengalaman belajar, sedangkan pernyataan mitra dapat menjelaskan kesesuaian solusi dengan kebutuhan lapangan. Apabila data respons belum dikumpulkan, kondisi tersebut perlu dinyatakan sebagai keterbatasan evaluasi, bukan diisi dengan pernyataan yang belum terverifikasi.

Integrasi Edukasi, Partisipasi, dan Verifikasi sebagai Model Pemberdayaan

Salah satu kontribusi kegiatan pengabdian ini adalah pengembangan model platform yang menghubungkan peningkatan literasi, aktivitas partisipatif, dan pemeriksaan informasi dalam satu sistem. Model tersebut berangkat dari pemahaman bahwa teknologi demokrasi tidak cukup berfungsi sebagai media distribusi informasi. Sistem juga perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dan memeriksa kualitas informasi yang digunakan dalam diskusi publik.

Tabel 4. Kontribusi Komponen platform terhadap Tujuan Pengabdian

Komponen	Fungsi	Indikator Evaluasi
Edukasi	Mengembangkan pemahaman demokrasi dan literasi digital	Skor pre-test dan post-test
Partisipasi	Memfasilitasi diskusi, aspirasi, dan pelaporan isu	Perubahan indikator partisipasi
Verifikasi	Mendukung pemeriksaan informasi	Hasil tes verifikasi dan dokumentasi latihan

Sumber: Data hasil pengabdian

Hasil evaluasi literasi dan partisipasi menunjukkan perubahan positif pada seluruh indikator yang dilaporkan. Pola ini mendukung relevansi penggabungan edukasi dan penyediaan ruang partisipasi. Namun, kontribusi setiap komponen belum dapat dipisahkan secara empiris apabila tidak tersedia data penggunaan fitur atau pengukuran khusus terhadap masing-masing komponen.

Integrasi ketiga komponen tetap memiliki nilai praktis sebagai kerangka pemberdayaan. Edukasi memberikan dasar pengetahuan, partisipasi menyediakan ruang penerapan, dan verifikasi mendukung tanggung jawab dalam penggunaan informasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan pemahaman demokrasi digital sebagai sistem yang menghubungkan akses informasi dan keterlibatan Masyarakat (Ali et al. 2024; Van Dijk, 2020). Efektivitas model perlu dinilai melalui pemantauan penggunaan platform, evaluasi hasil belajar, dan dokumentasi aktivitas peserta.

K keberlanjutan program membutuhkan pembagian peran yang jelas antara tim pengabdian, mitra, dan masyarakat. Tindak lanjut dapat berupa pembaruan materi, pendampingan verifikasi informasi, pengelolaan diskusi, serta penyusunan prosedur pelaporan isu. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan yang ditemukan tetap bertahan setelah kegiatan berakhir

Keterbatasan Pengabdian dan Arah Pengabdian Lanjutan

Hasil kegiatan memberikan implikasi praktis bagi pengembangan program literasi demokrasi digital. Bagi mitra, peningkatan seluruh indikator literasi dan partisipasi dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pendampingan berikutnya. Indikator pelaporan isu yang masih lebih rendah daripada indikator diskusi dan penyampaian aspirasi perlu memperoleh perhatian lebih besar. Bagi peserta, kegiatan lanjutan dapat menitikberatkan penerapan keterampilan verifikasi dan penggunaan saluran partisipasi secara bertanggung jawab.

Bagi pengelola platform, hasil yang tersedia menunjukkan perlunya memperkuat evaluasi penggunaan setiap fitur. Penilaian perlu mencakup kemudahan akses, efektivitas materi, aktivitas partisipatif, dan keterampilan verifikasi. Pengembangan sistem berbasis kebutuhan pengguna dapat membantu memastikan bahwa fitur yang tersedia sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan Masyarakat (Blumler & Coleman 2021).

Interpretasi hasil masih memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, informasi mengenai jumlah peserta, karakteristik responden, instrumen pengukuran, dan data individual belum disajikan secara lengkap. Kedua, metode perhitungan peningkatan

akses informasi, efisiensi waktu, dan penurunan disinformasi perlu dijelaskan. Ketiga, hasil pengujian statistik yang disebutkan dalam naskah, seperti *paired-sample t-test*, *N-Gain*, dan regresi sederhana, perlu ditampilkan apabila analisis tersebut benar-benar dilakukan. Keempat, data respons peserta dan mitra belum tersedia dalam dokumen yang ditelaah.

Keterbatasan tersebut memengaruhi kekuatan kesimpulan mengenai efektivitas dan keberlanjutan program. Perbandingan pre-test dan post-test menunjukkan perubahan skor, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat. Data wawancara, observasi, dan evaluasi pengguna diperlukan untuk menjelaskan pengalaman peserta, kendala implementasi, serta faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program.

Tindak lanjut perlu diarahkan pada penguatan keterampilan pelaporan isu, evaluasi kemampuan verifikasi melalui tugas praktik, pengumpulan umpan balik peserta dan mitra, serta pemantauan keberlanjutan penggunaan platform. Pendekatan evaluasi yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai capaian program. Dengan demikian, pengembangan *Pojok Literasi Demokrasi Digital* dapat didasarkan pada hasil pengukuran dan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus menyediakan dasar yang lebih kuat bagi replikasi program pada hal lain dalam menghadapi tantangan disinformasi yang semakin kompleks.

Dengan demikian, meskipun pengabdian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan model demokrasi digital berbasis literasi dan partisipasi, masih terdapat ruang yang luas untuk pengembangan lebih lanjut. Pengabdian lanjutan diharapkan tidak hanya memperkuat temuan yang telah ada, tetapi juga mampu memperluas cakupan analisis serta meningkatkan kompleksitas model, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik demokrasi digital.

SIMPULAN

Keberlanjutan program “Pojok Literasi Demokrasi Digital” diarahkan melalui pendampingan berkala, pembaruan materi edukasi, penguatan keterampilan verifikasi informasi, serta optimalisasi fitur diskusi, penyampaian aspirasi, dan pelaporan isu. Keterlibatan aktif mitra dan masyarakat diperlukan untuk memastikan platform tetap dimanfaatkan setelah kegiatan pengabdian berakhir. Evaluasi berkala terhadap penggunaan platform, perkembangan literasi, dan partisipasi masyarakat menjadi dasar perbaikan program. Replikasi pada wilayah lain dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan, karakteristik masyarakat, dan ketersediaan infrastruktur digital. Dengan demikian, program diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi berkembang menjadi upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dalam memperkuat demokrasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Lubis, S., Darlis, M. A. A., Demak, H., & Ikbali, M. (2024). Charting the future of digital democracy: A comprehensive bibliometric and systematic review. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 382–396. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3781>
- Blumler, J., & Coleman, S. (2021). After the crisis, a “new normal” for democratic citizenship? *Javnost - The Public*, 28(1), 3–19.
- Boulianne, S. (2020). Twenty years of digital media effects on civic and political participation. *Communication Research*, 47(7), 947–966.
- Congge, U., Guillamón, M.-D., Nurmandi, A., Salahudin, & Sihidi, I. T. (2023). Digital democracy: A systematic literature review. *Frontiers in Political Science*, 5, Article 972802.
- Fadilla, A., & Rahmawati, D. E. (2025). Mapping the transformation of political participation through digital citizenship: Global trends from a bibliometric analysis (2019–2024). *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 10(2), 1509–1524.
- Fathullah, A. N., Hidayat, M. A., & Pratama, A. A. (2025). Digital transformation of public participation in Indonesia’s constitutional system: The effectiveness of the Indonesian House of Representatives’ aspiration channel as an instrument of participatory democracy. *Constitutionale*, 6(1), 67–78.
- Guess, A. M., & Lyons, B. A. (2020). Misinformation, disinformation, and online propaganda. In N. Persily & J. A. Tucker (Eds.), *Social media and democracy: The state of the field, prospects for reform* (pp. 10–33). Cambridge University Press.
- Nayyar, G., Pleninger, R., Vorisek, D., & Yu, S. (2024). *Digitalization and inclusive growth*. World Bank.
- Nguyen, T. M. C., & Lee, C. S. (2026). *Fact-checking against misinformation by generative artificial intelligence conversational agents: The role of digital literacy* [Preprint]. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6427311>
- Priyono, S. H. (2026). Digital democracy in post-2024 Indonesia: Between expanded participation and normalized polarization. *Indonesian Journal of Digital Society Is a Scientific Journal*, 2(1), 1–16.
- Raudiah, A., Rohid, N., & Fikroh, S. (2026). Pengawasan partisipatif: Media sosial sebagai strategi komunikasi Bawaslu Tuban. *KOMVERSAL*, 8, 382–399. <https://doi.org/10.38204/komversal.v8i1.2843>
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia’s rise in digital democracy and youth’s political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(4), 443–454.
- Singh, J., & Ramaiah, C. K. (2021). Media and information literacy. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 41(4), 237–239.
- Theocharis, Y., & van Deth, J. W. (2017). *Political participation in a changing world: Conceptual and empirical challenges in the study of citizen engagement*. Routledge.
- van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. John Wiley & Sons.
- Wahidin, D., Utami, I. S., Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Digital democracy transformation in Indonesia: Opportunities, challenges, and future solutions. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 10(1), 15–42.
- Wiyono, S., Hanock, E. E., & Arwam, B. A. (2025). Strategi misi digital berdasarkan survei penetrasi internet 2024: Adaptasi penggunaan media sosial generasi Z. *Rei Mai: Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 61–71.
- Yaseen, H., Mohammad, A. S., Ashal, N., Abusaimh, H., Ali, A., & Sharabati, A.-A. A. (2025). The impact of adaptive learning technologies, personalized feedback, and

interactive AI tools on student engagement: The moderating role of digital literacy.
Sustainability, 17(3), Article 1133.